



KR-Chandra AN

SEMARANG PARADE 476: Sejumlah warga yang tergabung dalam Komunitas Kebaya Diajeng Semarang (KDS) menyemarakkan acara Semarang Parade 476 bertemakan ‘Sarungku Gayaku’ menampilkan peragaan busana berkebaya dan bersarung di Kota Lama Semarang, Jumat (5/5/2023). Acara yang digelar memeriahkan HUT ke-476 Kota Semarang ini dihadiri Walikota Semarang Ir Hj Hevearita G Rahayu MSon dan ribuan warga dengan mengenakan kebaya dan sarung.

TERAPKAN METODE DUA PANEL

KPU Cegah Kecelakaan Kerja Petugas KPPS

JAKARTA (KR) - Berdasarkan analisis yang dilakukan KPU, penerapan metode dua panel dapat membuat durasi atau rentang waktu penghitungan suara di pemilu menjadi lebih efisien.

Rencana penerapan metode penghitungan suara dua panel itu ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat kelelahan karena lamanya penghitungan suara, seperti yang terjadi di Pemilu 2019.

“Menurut analisis kami, dengan penggunaan dua panel tersebut, waktunya jauh akan lebih efisien,” ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik kepada wartawan di Kantor KPU RI,

Jakarta, Jumat (5/5).

Menurut Idham, sebelumnya metode satu panel dalam penghitungan suara di Pemilu 2019 membuat penghitungan suara dan penulisan berita acara hasil pemungutan suara selesai pada dini hari. Oleh karena itu, KPU berencana menerapkan metode penghitungan suara dua panel agar penghitungan suara dan penulisan berita acara hasil pemungutan suara dapat diselesaikan lebih cepat.

“Kami berharap kecelakaan kerja yang pernah terjadi di

tahun 2019 pada saat hari pemungutan suara itu tidak terulang kembali. Kami berkomitmen untuk memitigasi potensi kecelakaan kerja,” ujar Idham.

Dengan penerapan metode baru itu, penghitungan suara di Pemilu 2024 akan terdiri atas panel A atau panel pertama yang digunakan untuk menghitung perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPD RI.

Kemudian, ada pula panel B atau panel kedua untuk menghitung suara pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dengan metode dua panel itu, KPPS yang beranggotakan tujuh orang pe-

tugas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan menghitung hasil pemungutan suara di panel pertama dan kelompok kedua akan menghitung hasil pemungutan suara di panel kedua.

Ketentuan penerapan metode panel itu pun akan dimuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pemungutan dan penghitungan suara. Penghitungan suara dengan metode dua panel di Kota Palembang Sumatera Selatan, Kamis (27/4) lalu. **(Ant/Has)-f**

SELAMA KTT ASEAN 2023

Polri Antisipasi Serangan Siber

JAKARTA (KR) - Polri bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerjasama mengantisipasi terjadi serangan siber pada saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT), 9-11 Mei.

Asisten Operasi Kapolri (Asops) Irjen Pol Agung Setya Imam Effendy dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (5/5) menyebut, Polri menyiapkan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengantisipasi serangan siber yang kemungkinan terjadi. “Terkait potensi gangguan yang bisa muncul di ranah siber, kami juga bersama BSSN menyelenggarakan upaya pengamanan wilayah siber ini,” ujarnya.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan, pengamanan di wilayah siber itu dilakukan dengan konfigurasi terintegrasi bersama BSSN, Polri, intel BIN, dan intel TNI. “Ini menjadi dinamika yang akan terus kami kolaborasikan dan padukan satu sama lain,” ucapnya.

Menurut Agung, aspek keamanan bukan hanya apa yang terlihat, tapi ada juga yang tidak terlihat seperti serangan

siber. “Antisipasi (serangan siber) ini terus kami kelola bersama BSSN agar kemudian semua kegiatan KTT tidak ada gangguan siber. Ini kami lakukan persiapan dan langkah-langkahnya,” tuturnya.

Polri resmi melaksanakan operasi terpusat kepolisian dengan sandi Operasi Komodo 2023 terhitung mulai tanggal 5-12 Mei. Total ada delapan satgas yang bekerja dalam operasi tersebut, yakni Satgas Preemtif, Preventif, Walrolakir, Tindak, Gakkum, Anti Teror, Humas, dan Banops. Delapan satgas tersebut dipimpin jenderal bintang satu.

Satgas Preemtif akan dipimpin oleh Dirkamsus Baintelkam. Kemudian Satgas Preventif dipimpin Dirsabhara Baharkam Polri. Lalu Satgas Walrolakir dipimpin Dirgakkum Korlantas. Selanjutnya Satgas Tindak dipimpin oleh Danpas II Korbrimob.

Satgas Gakkum dipimpin oleh Dirsiber Bareskrim. Satgas Anti Teror dipimpin langsung Dirtindak Densus 88 Antiteror, Satgas Humas dipimpin Karopenmas Divisi Humas dan Satgas Banops dipimpin Karo Tekkom Div TIK Polri. **(Ant/Has)-f**

TERKAIT KEPEMILIKAN ASET RAFAEL ALUN

KPK Periksa Notaris PPAT

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa satu orang notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait kasus penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo (RAT). Notaris tersebut dimintai keterangan soal dugaan kepemilikan aset RAT. “Franciscus Xaverius Arsin selaku notaris PPAT, saksi hadir dan didalam pengetahuan antara lain terkait beberapa kepemilikan aset dari tersangka RAT,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (5/5).

Menurut Ali, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap notaris PPAT Agus Hashim Ahmad dan dua pihak swasta Nanan Hadiretna Djohan dan Sandra Praditya, pada Kamis (4/5). Namun ketiga saksi tersebut tidak hadir dan akan segera dilakukan pemanggilan ulang oleh penyidik.

Penyidik KPK juga telah kembali memeriksa RAT terkait kepemilikan harta bendanya. “Tim penyidik juga memeriksa tersangka RAT dan kembali dikonfirmasi antara lain terkait dugaan kepemilikan harta benda dalam kedudukannya sebagai salah satu pejabat di Ditjen Pajak,” kata Ali.

KPK telah secara resmi menahan dan menetapkan RAT sebagai tersangka pada 3 April 2023. RAT ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak.

Tersangka diduga memiliki beberapa perusahaan. Salah satunya ialah PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. **(Ful)-f**

MAYORITAS DIKIRIM KE KAMBOJA

Kasus TPPO Naik 7 Kali Lipat

TANGERANG (KR) - Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) mengalami peningkatan cukup drastis pada periode tahun 2020-2023. Berdasarkan data periode 2020-2023 itu tercatat sebanyak 1.800 kasus TPPO atau naik tujuh kali lipat.

“Sejak tahun 2020 sampai 2023 saat ini, 1.800 orang telah menjadi korban pengiriman PMI nonprosedural ke berbagai negara,” ungkap Diplomat Muda Direktorat Perlindungan WNI Kemlu RI Rina Komaria di Tangerang, Jumat (5/5).

Menurutnya, jumlah kasus TPPO PMI yang dikirim ke luar negeri secara ilegal telah meningkat tujuh kali lipat, mulai dari sekira lebih 140 kasus pada tahun 2020 hingga 2021. Kemudian meroket di angka 700 ka-

sus pada tahun 2021 sampai 2022 dan terakhir menyentuh angka 1.800 orang pada tahun 2023.

Rina menjelaskan, dari jumlah tersebut, mayoritas sekitar 1.000 orang PMI ilegal di antaranya dikirim ke luar negeri yaitu ke negara Kamboja. “Dan di sana, mereka (PMI) dipekerjakan pada perusahaan yang memiliki situs judi melalui online scammer yang diiming-iming tawaran kerja di luar negeri, bahkan rata-rata dipaksa bekerja,” bebernya.

Rina berharap kepolisian ataupun pihak terkait lainnya bisa bersinergi bersama untuk langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan cara pengungkapan ataupun menangkap terhadap para sindikat TPPO itu. “Sehingga dalam hal ini dari sisi kami bisa semakin kuat dalam upaya

perlindungan para WNI di luar negeri,” tuturnya.

Selain itu, kata Rina, instansi terkait lainnya juga dapat mengedukasi masyarakat agar tidak terlena penipuan dengan lowongan kerja yang banyak beredar di media sosial dengan menjanjikan bekerja sebagai operator game online, customer service, marketing, dan lainnya ke negara yang konflik.

“Jadi sangat berhati-hati dalam melamar pekerjaan melalui lowongan pekerjaan yang tidak jelas, cek dulu keabsahannya. Karena dalam catatan kami, WNI di sektor ini semakin menyebar, yang tadinya hanya tercatat di Filipina dan Kamboja, sekarang sudah ada di Myanmar, Laos, Vietnam, bahkan UEA (Uni Emirat Arab),” ungkap-nya. **(Ant/Has)-d**



KR-Abrar

Panitia Pelaksana Musyda Muhammadiyah dan Aisiyyah Kota Yogyakarta bersama jajaran Direksi PT BP KR.

PENJARINGAN PENGURUS SEJAK JANUARI LALU PDM/PDA Yogya Gelar Musyda dan Syawalan

YOGYA (KR) - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Daerah Aisiyyah (PDA) Kota Yogyakarta berencana menggelar musyawarah daerah (Musyda) ke-13 tahun 2023. Musyda ini untuk memilih kepemimpinan baru masa bakti 2022-2027.

Pelaksanaan Musyda PDM dan PDA Kota Yogya berbarengan selama dua hari Sabtu-Minggu (13-14/5) di SMA Muhammadiyah 1 (Muhi) Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam Musyda kali ini adalah ‘Membumikan Risalah Islam untuk Jogja Berkemajuan’. Sedangkan Tema Musyda Aisiyyah Kota ‘Perempuan Berkemajuan Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kota Yogyakarta’.

Selain Musyda, Pengurus PDM dan PDA Kota Yogya juga menyelenggarakan Syawalan Silaturahmi dan Mangayubagya Jamaah Calon Haji (Calhaj) tahun 1444 H/2023 M bersama Ustadz Dr H Anwar Abbas MM MAg (Ketua PP Muhammadiyah).

“Kegiatan syawalan PDM/PDA Kota Yogyakarta tersebut akan diadakan di Gedung Sportorium UMY, Sabtu (6/5) pukul 07.00 hingga selesai,” ujar A Latief Baedhowi, Ketua Panitia Musyda Muhammadiyah Kota Yogya dalam silaturahmi dan jajaran Direksi PT BP *Kedaulatan Rakyat* (KR) di Ruang Direksi Jalan Margo Utomo 40-46

Yogya, Jumat (5/5).

Latief Baedhowi didampingi Sigit Haryo Y, Giyok Sutanto, Akhid Widi (PDM Kota Yogya) dan Sri Istifada MSi (Ketua Panitia Musyda Aisiyyah) dan diterima Dirut PT BP KR M Wirmon Samawi SE MIB, Imam Satriadi SH (Direktur Keuangan), Prof Dr Inajati Adrisjanti (Komisaris Utama) dan Drs H Ahmad Luthfie MA (Wapemred KR).

Menurut Latief, dalam penjarangan calon pengurus PDM Muhammadiyah Kota Yogya sudah dilakukan sejak 5 Januari 2023. Panitia penjarangan mengusulkan 139 calon yang punya hak pilih. Namun, dari jumlah calon yang diusulkan itu, mereka ada yang tak mengembalikan hak pilihnya ada juga yang bersedia.

Dari batas akhir penjarangan calon 15 April 2023 lalu, setelah diverifikasi ada 59 calon yang bersedia. Kemudian, 59 orang calon pengurus tersebut dalam Musyda dipangkas lagi menjadi calon pengurus inti PDM Kota Yogya dengan sistem voting.

Dari 13 pengurus yang terpilih, dengan suara terbanyak mereka berpeluang menjadi Ketua PDM Kota Yogya masa bakti 2022-2027. Proses pemilihan Pengurus PDM dan PDA Kota Yogya sama dengan muktamar Muhammadiyah dan Musywil Muhammadiyah dan Aisiyyah DIY. **(Rar)-f**

KBRI MANILA FASILITASI PEMULANGAN

143 WNI Korban Penipuan Online

JAKARTA (KR) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila, Filipina, tengah mendata dan akan memfasilitasi pemulangan 143 Warga Negara Indonesia (WNI) korban penipuan online atau online scam ke Indonesia.

“Tadi pagi kita cukup intensif melakukan komunikasi dengan Manila,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta, Jumat (5/5).

Retno mengatakan, Kementerian Luar Negeri memperoleh laporan dari KBRI Manila bahwa otoritas penegak hukum Filipina telah melakukan operasi penyelamatan korban.

Operasi tersebut berhasil menyelamatkan total 1.048 orang yang berasal dari 10 negara, termasuk dari 143 orang dari Indonesia. Sembari terus melakukan penanganan di hilir kasus ini, Retno mene-

kankan kembali pentingnya pembenahan masalah di hulu.

Upaya diseminasi mengenai praktik perdagangan manusia, menurutnya, perlu terus dilakukan sampai ke tingkat daerah hingga desa. “Law enforcement harus betul-betul ditegakkan. Jika tidak dilakukan pembenahan di hulu, maka korban akan semakin banyak dari hari ke hari,” demikian Menlu. **(Ant/San)-f**